

MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI PROFESIONALISME TENTARA NASIONAL INDONESIA

Yusa Djuyandi

Jurusan Komunikasi Pemasaran, Faculty of Economic and Communication, BINUS University
Jln. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
yusa@binus.ac.id

ABSTRACT

Democratic development for more than 14 years was seen walking "back and forth", one reason is the slow process of the professionalism of the Indonesian National Army (TNI). In history, that the lack of military professionalism has resulted in the birth of military force against civilians, and military involvement in politics, it ultimately undermined democracy that aims to strengthen civil society. The purpose of this study is to describe and analyze the process of democratic development through the realization of military professionalism. The research method used was qualitative method through the use of primary data (observations and interviews) and secondary data (media and documents). Democratic development aims to generate social and political conditions better, one that supports that effort is the creation of military professionalism. But today, it is appeared several groups trying to restore military strength in practical politics. Based on the discussion, the writer concludes that efforts to build democracy in Indonesia met with resistance. This is due to the persistence of the effort to bring the military back into the world of practical politics.

Keywords: *democracy, professionalism, civil society, practical politics*

ABSTRAK

Pembangunan demokrasi selama kurang lebih 14 tahun masih terlihat berjalan "maju-mundur", salah satu sebabnya adalah lambatnya proses profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sejarah, bahwa tidak adanya profesionalisme TNI telah mengakibatkan lahirnya pemaksaan militer terhadap masyarakat sipil, dan keterlibatan militer dalam berpolitik, hal tersebut pada akhirnya melemahkan demokrasi yang bertujuan memperkuat civil society. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembangunan demokrasi melalui perwujudan profesionalisme TNI. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui penggunaan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder (media dan dokumen-dokumen). Pembangunan demokrasi bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial politik yang lebih baik, salah satu upaya yang mendukung hal tersebut adalah terciptanya profesionalisme TNI. Akan tetapi saat ini muncul beberapa pihak yang mencoba untuk mengembalikan kekuatan militer dalam kehidupan politik praktis. Berdasarkan hasil pembahasan peneliti berkesimpulan bahwa upaya membangun demokrasi di Indonesia masih menemui hambatan, hal ini dikarenakan masih adanya upaya untuk membawa kembali TNI kedalam dunia politik praktis.

Kata kunci: *demokrasi, profesionalisme, civil society, politik praktis*

PENDAHULUAN

Indonesia diakui oleh negara-negara lain sebagai negara dengan tingkat pembangunan demokrasi yang sangat pesat, setelah terbebas dari belenggu kekuasaan orde baru bangsa Indonesia seolah-olah terlahir menjadi bangsa yang baru. Walaupun keterbebasan dari belenggu belum banyak memberikan bangsa Indonesia kehidupan yang sangat ideal, keterbebasan yang diprakrasai oleh para pahlawan reformasi cukup memberikan angin segar bagi kehidupan berdemokrasi. Beberapa contoh kecil dari kemajuan berdemokrasi di Indonesia adalah adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk memilih sosok pemimpin secara langsung, dan kebebasan untuk berserikat.

Kebebasan hanya merupakan salah contoh kecil dari adanya pembangunan demokrasi di Indonesia yang sampai saat ini masih terus dibangun. Pembangunan demokrasi menjelang 14 tahun reformasi pun sebenarnya terlihat masih berjalan “maju-mundur” menyesuaikan dengan irama dan kondisi sosial-politik yang berkembang. Salah satu permasalahan yang menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia saat ini terlihat “maju-mundur” atau bahkan melemah dapat kita ketahui dari lambatnya proses profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu upaya untuk mereformasi TNI dan membangun demokrasi yang berasal dari pemerintahan sipil (*civil government*).

Lambatnya proses profesionalisme TNI itu sendiri dapat berakibat negatif bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, dimana ketidakprofesionalan militer akan dapat menghadirkan kembali pemaksaan militer kepada pemerintah, dimana militer dapat berpolitik, dan menghambat kemajuan *civil society*, serta yang paling berbahaya membawa militer keluar dari tugas utamanya. Pentingnya pembangunan profesionalisme militer pernah dikutip oleh Abdoel Fattah (2005: 250) dari hasil penelitian Muthiah Alagappa, bahwa pengaruh profesionalisme militer akan menghindarkan pemaksaan militer kepada pemerintah, membuat militer tidak berpolitik, akan menyokong kemajuan *civil society* dan membawa militer kepada fungsi sebenarnya, yaitu bidang pertahanan negara.

Sejarah Indonesia pernah mencatat dampak buruk dari ketiadaan profesionalisme TNI ketika berkuasanya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. TNI atau yang dahulu disebut dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam politik pemerintahan Indonesia. Betapa tidak, dengan konsep dwi-fungsinya, TNI berhasil memasuki semua lini pemerintahan dan masyarakat. Dengan berhasilnya TNI memasuki semua lini tersebut, maka otomatis setiap kebijakan yang dilahirkan harus sesuai dengan kepentingan politik militer atau penguasa militer yang menjadi penguasa.

Kekuatan militer pada masa orde baru tidak hanya terdapat di dalam lembaga eksekutif tetapi juga sudah merambah pada lembaga legislatif (DPR). Adanya fraksi TNI/POLRI merupakan salah satu wujud nyata dari keinginan militer untuk dapat berperan langsung dalam kehidupan politik. Tidak hanya di situ, dengan berbagai cara Soeharto juga berusaha untuk memasukan pengaruh dan kekuatan militer melalui Golongan Karya (GOLKAR), dimana Golkar kemudian memainkan peran di parlemen, bukan sebagai sebuah partai, melainkan sebagai organisasi golongan karya yang terdiri dari beberapa organisasi massa (Ormas).

Konsep dwi-fungsi ABRI yang pernah berlaku pada masa orde baru begitu berbahaya bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Itu karena hal tersebut cenderung membawa militer kepada konsep “dwiporsi” kekuasaan, dimana pada akhirnya dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sebab, ABRI/TNI telah menguasai berbagai aspek kehidupan dengan praktik-praktik yang tidak wajar, dan mereka juga oleh Soeharto dijadikan alat kekuasaan yang kemudian mengakibatkan simpati masyarakat terhadap ABRI/TNI semakin berkurang.

Oleh karena itu, pembangunan demokrasi tidak dapat dilepaskan juga dari upaya untuk mewujudkan profesionalisme TNI. Hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Lambatnya proses profesionalisme TNI saat ini perlu diwaspadai. Begitu pula dengan mulai munculnya kembali kecenderungan untuk menarik TNI ke dalam kegiatan politik praktis, dan atau menjadi partisan politik.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan profesionalisme TNI diantaranya adalah penelitian dari Mulyadi (2009) dalam judul penelitiannya “Depolitisasi Militer Indonesia: Studi Kasus Fungsi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2009”. Penelitian Mulyadi memfokuskan pada pemikiran bahwa membangun TNI menjadi ‘militer profesional’ mensyaratkan perlunya depolitisasi militer.

Penelitian berikutnya adalah dari Darmawan (2005) dengan judul “Pengaruh Reformasi Internal TNI terhadap Profesionalisme Aparat Teritorial dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah: Studi Kasus di Kodim 0501 Jakarta Pusat.” Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak dari reformasi internal di TNI terhadap profesionalisme aparat TNI di Kodim 0501 Jakarta Pusat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khasman (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Prajurit Siswa TNI AL tentang profesionalisme TNI dan Implikasinya terhadap Pembentukan Ketahanan Ideologi: Studi di Pusdiklapa dan STTAL Kobangdikal Surabaya, Jawa Timur.” Penelitian ini lebih memfokuskan pada persepsi prajurit siswa TNI AL tentang profesionalisme TNI dan dampaknya terhadap pembentukan ketahanan ideologi.

Dari pemaparan ketiga hasil penelitian terdahulu tersebut dan juga berdasarkan penelusuran peneliti belum terdapat satupun penelitian yang kemudian mengkaji tentang pentingnya membangun demokrasi dengan cara mewujudkan profesionalisme TNI. Dalam menjalankan penelitian ini, digunakan beberapa teori dan konsep yang terkait dengan masalah dan judul penelitian yang diangkat, yaitu diantaranya teori dan konsep pembangunan, demokrasi serta profesionalisme militer.

Definisi pembangunan selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau ruang lingkup perekonomian, dimana di dalamnya terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan jumlah modal. Akan tetapi, yang diungkapkan oleh Van Nieuwenhinze (1969) bahwa “pembangunan adalah suatu istilah yang kompleks - mempunyai pengertian yang berbeda dan tidak konsisten – tergantung pada siapa, kondisi dan konteksnya” memberikan pemahaman bagi kita bahwa pembangunan itu sendiri mempunyai banyak arti, bahkan mungkin terdapat keraguan dan kekeliruan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan.

Peet (1999: 3) mengatakan: *“Development theories differ according to the political positions of their adherents, their philosophical origins, and their place and time of construction. They differ also according to scientific orientation, that is, whether predominantly economic, sociological, anthropological, historical, or geographical.”* Akan tetapi, untuk mendapatkan suatu gambaran tentang pembangunan yang dapat masuk keseluruhan aspek, dengan tidak condong ke salah satu kegiatan atau studi, diperlukan adanya definisi pembangunan yang bersifat umum (*general*). Seperti halnya definisi pembangunan yang dikemukakan oleh Johan Galtung (dalam Trijono, 2007: 1), yaitu “Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.” Sedangkan Peet (1999: 1) mendefinisikan pembangunan sebagai: *“Development means improvement in a complex of linked natural, economic, social, cultural, and political conditions.”*

Membahas tentang pembangunan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari teori dan konsep demokrasi itu sendiri, demokrasi secara etimologi berasal dari gabungan dua kata Yunani, yakni

demos (rakyat) dan *kratos* (pemerintah) atau dalam bahasa ringkasnya adalah pemerintahan oleh rakyat. Adanya gabungan dua kata *demos* dan *kratos* memberikan makna yang sangat besar bagi terciptanya suatu negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana negara tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konteks negara demokrasi (Prasetyo, 2005: 9).

Terdapat pengertian demokrasi yang bersifat sempit dan luas (komprehensif). Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter (dalam Tamrin, 2006: 10), yaitu baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik, kemampuan untuk memilih pemimpin di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.

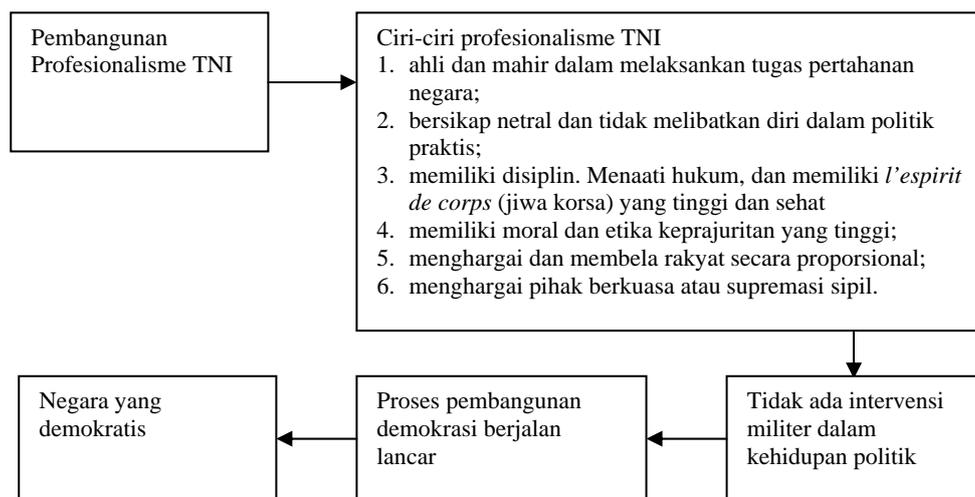
David Beetham dan Kevin Boyle mengatakan bahwa secara konvensional suatu negara disebut demokratis jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif (Beetham dan Boyle, 2000: 21). Sedangkan Mayo (dalam Fattah, 2005: 268) mengungkapkan bahwa “*Democracy is a political method, that is to say, a certain type of institutional arrangement for arriving at political-legislative and administrative-decisions and hence incapable of being an end in itself, irrespective of what decisions it will produce under given historical conditions. And this must be strating point of my attempt at defining it.*”

Kemudian terkait dengan teori dan konsep profesionalisme militer (TNI), bahwa menurut Fattah (2005: 244): “*Profesionalisme adalah kombinasi dari pengetahuan dan kemahiran yang berkemampuan tinggi dalam bidang yang spesifik. Sedangkan profesi merupakan tugas dan pekerjaan yang spesifik.*” Sedangkan menurut Perlmutter (dalam Fattah, 2005: 244) bahwa Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan latihan dan pendidikan yang sempurna dalam suatu bidang yang terspesialisasi. Tujuan pendidikan yang lama dan intensif dimaksudkan agar tetap terpelihara tingkat-tingkat prestasi dan pelaksanaan yang tinggi sesuai dengan standar-standar, baik yang ditentukan oleh aturan main organisasi atau pendapat para kolega. Tingkat profesionalisme suatu pekerjaan tertentu diukur lewat pelaksanaan, metode, karakter, status, dan standar orang yang berkecimpung di dalamnya. Karena status khusus ini, kaum profesional yang sejati memperoleh wewenang yang menentukan dalam hubungannya dengan pada klien (klien disini ialah rakyat dan pemerintah).

Huntington (dalam Fattah, 2005: 245-246) menyatakan, profesionalisme militer memiliki tiga ciri utama, yaitu, pertama, keahlian spesifik dan pengetahuan serta kemahiran yang hanya bisa didapat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta selalu mengikuti perkembangan bidang profesinya. Kedua, tanggung jawab sosial yang khas. Karena itu, militer harus memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, mempunyai tanggungjawab kepada rakyat dan negara, karena tentara bukan milik pribadi pemimpinnya, dan tidak melayani kepentingan pribadi. Ketiga, karakter korporat yang menumbuhkan *l'espirit de corps*. Militer merupakan unit sosial yang punyaotonomi dan kemandirian dalam urusan internal, tradisi, dan kebiasaan yang membedakannya dengan unit sosial lain dalam masyarakat.

Mengutip pendapat Perlmutter dan Huntington, kemudian Fattah (2005: 247) merumuskan ciri-ciri profesionalisme TNI adalah sebagai berikut: ahli dan mahir dalam melaksanakan tugas pertahanan negara; bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis; memiliki disiplin, menaati hukum, dan memiliki *l'espirit de corps* (jiwa korsa) yang tinggi dan sehat; memiliki moral dan etika keprajuritan yang tinggi; menghargai dan membela rakyat secara proporsional; dan menghargai pihak berkuasa atau supremasi sipil.

Agar memudahkan dalam menganalisis permasalahan berdasarkan atas teori dan konsep yang digunakan maka berikut digambarkan sebuah kerangka pemikiran. Perhatikan gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yaitu dari informan dan observasi, serta data sekunder di lapangan. Untuk itu, desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini dipilih dan dianggap tepat karena metode kualitatif relevan dan cocok dengan masalah penelitian yang diajukan melalui interpretasi proses dan makna.

Sumber data ini terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Data sekunder yang akan dijaring adalah melalui studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Informan yang dipilih adalah para pengamat dan akademisi di bidang pertahanan dan keamanan, serta Anggota Komisi I (Pertahanan) DPR RI.

Sedangkan sumber data sekunder adalah melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, notulensi rapat, pedoman umum, hasil studi dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar wawancara sebagai uraian lebih lanjut dari pertanyaan penelitian, pedoman observasi, dan dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk memberi kemudahan dalam kegiatan penelitian tidak dimaksudkan untuk membatasi tingkat fleksibilitas peneliti sebagai instrumen di lapangan.

Wawancara dilakukan dengan para pengamat dan akademisi di bidang pertahanan dan keamanan, serta Anggota Komisi I (Pertahanan) DPR RI. Observasi dilakukan terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, notulensi rapat, pedoman umum, hasil studi dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Lebih lanjut, proses pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini, yaitu berupa kata-kata, tindakan, dokumen, situasi, dan peristiwa yang dapat diobservasi. Sumber data yang dimaksud adalah kata-kata diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui observasi dan wawancara dan dokumen berupa catatan kegiatan yang tersimpan dalam dokumentasi.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan atas kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan dan kebenaran data (*credibility*) yang diperoleh dari *informan-informan* yang langsung terlibat dalam proses demokrasi deliberatif pembahasan RUU Keamanan Nasional, kebenaran (*correctness*) suatu deskripsi, kesimpulan, dan penjelasan (*explanation*) yang dapat diketahui dari kesesuaian dengan peraturan perundangan serta naskah/dokumen penting lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Demokrasi dengan Profesionalisme TNI

Dalam suatu negara demokrasi pembangunan tidak hanya difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mekanisme pasar atau liberal, dimana kekuatan ekonomi sepenuhnya berada ditangan rakyat. Lebih dari itu, dalam negara demokrasi pembangunan juga ditujukan kedalam berbagai sektor baik sektor sosial, budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan, dimana semuanya akan bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang bebasiskan pada kepentingan rakyat sipil.

Sebagai suatu isu sentral, demokrasi telah menjadi obyek studi yang sangat luas rentang pembahasannya. Diantara sekian banyak rentang pembahasan, salah satu hal yang paling banyak mendapat perhatian di sebagian besar negara dunia ketiga adalah terkait dengan persoalan penegakkan supremasi sipil atas militer (*civilian supremacy upon military*) dan *civil-society*. Penekanan proses pembangunan demokrasi yang ditilik dari permasalahan tersebut ditekankan oleh: Diamond (*civil-society*); Huntington, Diamond, Plattner, dan Shaw (*civilian suprmacy upon mlitary*).

Berbicara penegakkan supremasi sipil atas militer dan pembentukan *civil-society* dalam konteks pembangunan demokrasi, maka tidak akan terlepas pula dari upaya membangun militer yang profesional. Dalam konteks ini pengembangan kekuatan masyarakat dapat diwujudkan dengan menempatkan kembali perwira-perwira militer yang pernah ikut serta dalam persoalan sosial-politik kedalam barak, dan kemudian menyerahkan persoalan-persoalan tersebut kepada kelompok sipil.

Banyak peristiwa di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang menunjukkan ketika pemerintahan dipegang dan dikendalikan oleh kalangan militer maka demokrasi tidak dapat berkembang. Dalam beberapa hal, demokrasi hanya dijadikan sebagai hiasan dan proses demokrasi yang dijalankan hanyalah formalitas belaka, dalam hal ini Samuel P. Huntington menyebutkan ketika demokrasi kehilangan kekuatan sesungguhnya maka masyarakat tidak akan mampu untuk memaksa pemerintahnya untuk tunduk pada kekuatan masyarakat dan kepentingan warga masyarakat.

Sesungguhnya penjelasan yang turut memperkuat keterkaitan antara pembangunan demokrasi dengan pembangunan profesionalisme militer, juga dapat dilihat dari intisari demokrasi politik yang dikemukakan oleh George Sorensen yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Pengalaman di beberapa negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa ketidak profesionalan militer mengakibatkan lahirnya kompetisi politik yang tidak sehat, rendahnya partisipasi politik masyarakat secara murni, dan tidak adanya kebebasan politik dan sipil.

Pada masa orde baru, ketika pemerintahan dikendalikan oleh militer, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu didasarkan atas kepentingan golongan atau petinggi militer semata. Dampak itu semua adalah adanya lahirnya pemerintahan yang cenderung otoriter, kelahiran pemerintahan yang otoriter tentunya tidak saja berbahaya bagi kehidupan politik tetapi juga bagi kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, dimana kekuasaan akan dipergunakan sedemikian rupa untuk mengerahkan semua potensi dan sumber daya yang ada demi menguntungkan diri atau kelompok tertentu.

Melihat uraian di atas maka kita mendapatkan suatu gambaran bahwa salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru, yang akhirnya berakibat pada runtuhnya struktur sosial dan perekonomian masyarakat, adalah disebabkan oleh gagalnya para pemimpin untuk membangun profesionalisme TNI. Kepemimpinan Soeharto selama kurun waktu 32 tahun sepintas terlihat berhasil dalam membangun perekonomian dan kondisi negara yang relatif stabil, tetapi keberhasilan itu bersifat semu sebab pondasi pembangunan demokrasi bangsa Indonesia saat itu masih keropos akibat masuknya TNI dalam ranah politik praktis.

Roh demokrasi yang sebenarnya tidak dijalankan sehingga tidak terwujud substansi demokrasi, sebagai contoh: parlemen ada tetapi diisi oleh orang-orang yang pro-Soeharto, belum lagi dengan keberadaan Fraksi TNI/Polri di dalam parlemen yang semakin memperkuat dominasi kekuatan militer; pemilu dijalankan, tetapi hasil pemilu mudah ditebak. Mengutip Rauf (1997: 2): “sistem politik demokratis hanyalah merupakan sebuah produk dari perkembangan nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya terjadi di masyarakat.” Ini menunjukkan bahwa sebenarnya betapa penting menanamkan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi dan Profesionalisme TNI Pasca 14 Tahun Reformasi Sektor Keamanan

Pergerakan tuntutan reformasi 14 tahun yang lalu merupakan sebuah langkah bangsa Indonesia untuk menghindari keterpurukan yang jauh lebih dalam, modal yang dikeluarkan untuk suatu perubahan ini sangatlah besar. Tidak hanya kerugian materil yang harus dikeluarkan oleh bangsa ini hanya untuk sebuah reformasi, tetapi juga kerugian immateril berupa gugurnya para pejuang atau pahlawan reformasi di tangan aparat keamanan yang sangat bertindak represif.

Menurut Sukadis bahwa selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto perekonomian terlihat berkembang begitu pesat, bahkan Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Akan tetapi, pola pembangunan yang dibentuk oleh pemerintahan orde baru adalah pola pembangunan yang semu, sebab kemakmuran yang sesungguhnya adalah kemakmuran untuk segelintir orang dan bukan untuk rakyat banyak. Apa yang dikemukakan tersebut, juga peneliti amati dari cara dan gaya kepemimpinan Soeharto, dimana hanya beberapa golongan yang paling diuntungkan ketika kepemimpinan Soeharto, mereka adalah para pemilik modal yang kebanyakan berasal dari kalangan etnis tertentu, dan juga petinggi militer.

Selama 32 tahun orde baru berkuasa tindakan atau sikap kritis masyarakat terkait dengan protes atas kenikmatan pembangunan yang hanya dinikmati oleh segelintir golongan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan, alhasil yang bermain adalah intelegen dan juga aparat keamanan. Hal ini yang kemudian merangsang beberapa kalangan pergerakan untuk melepaskan diri dari kekuatan militer orde baru, para mahasiswa kemudian menuntut agar segera dilakukan perubahan mengingat keterpurukan bangsa ini sudah sedemikian hebatnya, ironisnya aksi ini dilawan oleh tindakan represif gabungan aparat keamanan. Peristiwa tersebut memberikan gambaran bagaimana penguasa orde baru memanfaatkan kekuatan militer sebagai suatu cara untuk mempertahankan posisinya, dan bahkan jauh dari itu militer telah banyak memainkan peran yang begitu besar dalam tata kehidupan bernegara. Melalui dwi fungsi ABRI, militer Indonesia berusaha menjadi sebuah kekuatan sosial politik, bukan lagi sebagai kekuatan pertahanan, bahkan dalam beberapa hal militer dapat memainkan peran dalam sektor perekonomian seperti halnya praktek bisnis militer.

Lahirnya pergerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka pintu demokrasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, berbicara bagaimana demokrasi sebagai satu fase peradaban modern dalam sejarah bangsa Indonesia dapat ditegakkan dengan konsisten. Sama seperti negara-negara lain, dalam menghadapi tantangan masa kini membutuhkan demokrasi sebagai jalan bagi keberagaman yang dimiliki masyarakat.

Ada banyak pendapat yang diberikan oleh para ahli ataupun negarawan mengenai demokrasi itu sendiri, tetapi secara umum: kebebasan, supremasi sipil dan kedaulatan rakyat adalah unsur-unsur yang merupakan tulang punggung dari mekanisme demokrasi itu sendiri. Sehingga, apabila unsur-unsur tersebut tidak ada atau terancam maka demokrasi juga mengalami ancaman. Inilah yang menjadi basis analisa dari penolakan terhadap Dwi Fungsi ABRI/TNI. Bukan dikarenakan oleh kebencian dan dendam kesumat atas pelanggaran HAM yang dilakukan TNI selama 32 tahun. Akan tetapi, lebih terutama karena pemahaman bahwa yang akan kita bangun adalah sebuah kekuatan sipil yang akan membangun sebuah masyarakat demokratis, dimana peran sosial, politik, ekonomi dan budaya sepenuhnya dikendalikan oleh kaum sipil. Artinya, Supremasi Sipil tidak bisa tidak adalah keniscayaan sejarah yang harus direalisasikan dalam perjuangan kita, demi penciptaan prasyarat minimum bagi tegaknya demokrasi.

Menurut Shiddiq (Anggota Komisi I DPR) bahwa pencabutan dwi fungsi merupakan hal yang wajar dilakukan bagi sebuah negara demokrasi, dimana dengan dihapuskannya dwi fungsi ABRI/TNI semua muara dan saluran demokrasi rakyat Indonesia akan dapat terbuka. Secara ekstrim bahwa tidak ada lagi dimensi kehidupan masyarakat Indonesia yang terintervensi oleh militer sebagai institusi dan perorangan, disisi lain juga bertujuan positif dalam membangun TNI yang handal serta profesional.

Pembangunan profesionalisme TNI merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari, mengingat selama 32 tahun kekuasaan orde baru TNI telah banyak berada diluar jalur mereka selaku institusi dan aparat pertahanan negara. Dengan pembangunan TNI yang profesional, maka TNI akan mampu berperan besar dalam menjaga pertahanan Indonesia dari setiap ancaman yang berasal dari luar, bahkan lebih dari itu kemampuan TNI untuk meninggalkan dunia politik dan berfokus pada dunianya akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka dan juga masyarakat. Seperti halnya di beberapa negara maju, maka militer dilarang untuk berpolitik, dan demokrasi dibangun dengan begitu kuatnya. Walaupun militer tidak berpolitik, militer tetap dapat merebut hati rakyat dengan berperan aktif menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Begitu halnya pula dengan TNI, ada banyak cara bagi TNI untuk dapat berperan serta bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini tanpa harus merusak kehidupan demokrasi.

Selama 14 tahun reformasi sektor keamanan pula TNI pada akhirnya dibawa kepada suatu paradigma baru dan melakukan reformasi internal. Selama kurun waktu 14 tahun TNI berusaha untuk tidak mau ketinggalan dalam proses reformasi yang menyeluruh, hal ini merupakan sebuah komitmen dari TNI untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pada dasarnya, perubahan di tubuh TNI bertujuan mewujudkan TNI yang profesional, efisien, efektif, dan modern (Fattah, 2005: 203). Hal ini juga bermaksud agar TNI bersama komponen bangsa lainnya dapat mendorong proses pembangunan demokrasi sebagai cita-cita reformasi.

Salah satu wujud konkret TNI untuk menyukseskan pembangunan demokrasi adalah dengan menerima keputusan penghapusan dwi fungsi mereka, dan juga menerima ketetapan yang dikeluarkan melalui Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri), Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, UU No. 3/2002, serta UU No. 34/2004. Hal ini menunjukkan bahwa TNI mau menjalankan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan sipil, dan TNI mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti dalam mendukung pembangunan demokrasi di Indonesia. Sayangnya saat ini muncul beberapa hal yang mencoba untuk mengembalikan kekuatan militer dalam kehidupan politik praktis, seperti: menarik TNI kedalam politik kepentingan salah satu kelompok, menempatkan pejabat dari kalangan militer sebagai caretaker Gubernur. Sebagai contoh Yuddy Chrisnandi menjelaskan peristiwa Penunjukan Mayjen TNI Tanri Bali Lamo sebagai *caretaker* Gubernur Sulawesi Selatan pada Tahun 2008 yang dianggapnya sebagai kekeliruan besar pemerintah dan adanya keinginan untuk memberikan hak pilih bagi anggota TNI disaat proses profesionalisme TNI belum seutuhnya selesai.

Dari apa yang telah dikemukakan oleh informan, peneliti menganalisis bahwa apabila hal ini dibiarkan maka segala upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu 14 tahun untuk membangun dan menciptakan iklim demokrasi di Indonesia akan menjadi sia-sia manakala upaya untuk menciptakan TNI yang profesional pada akhirnya tidak terwujud.

Menciptakan TNI yang Profesional

Menurut Shiddiq “Sejauh ini upaya dalam menciptakan TNI yang profesional masih terus dilakukan, disamping dengan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya upaya-upaya untuk membawa TNI kembali masuk kedalam politik praktis.” Azyumardi Azra dan Abdurrahman Wahid (dalam Fattah, 2005: 251) mengatakan bahwa para perwira yang profesional, waspada terhadap tarik menarik kekuatan politik, dan tidak mau berpolitik seharusnya kedepan dapat menjadi pemimpin TNI yang dapat terus membawa paradigma baru TNI dan mendukung pembangunan demokrasi.

Sisi positif dari reformasi TNI yang menekankan pada pembangunan profesionalisme TNI adalah mulai munculnya kesadaran sebagian besar kalangan di TNI, bahwasanya mereka harus tetap waspada terhadap tarik menarik kepentingan politik baik yang dilakukan oleh bekas pimpinannya maupun kalangan sipil yang mencoba membawa mereka kembali ke politik praktis. Disisi lain upaya membangun TNI yang profesional juga terus dilakukan dengan menyiapkan sarana pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, sehingga pada akhirnya kekuatan TNI akan mampu menjadi dasar pertahanan utama dari segala bentuk ancaman negara lain.

Dalam mewujudkan suatu negara yang demokratis perlu ada jaminan bahwa proses pembangunan demokrasi berjalan lancar dan untuk itu tidak boleh ada intervensi militer dalam kehidupan politik, intervensi militer tidak akan terwujud manakala upaya untuk mewujudkan profesionalisme TNI, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan reformasi TNI, terus secara konsisten dijalankan.

Peneliti menekankan atas pandangan yang dikemukakan oleh Fattah (2005: 247) bahwa profesionalisme TNI dapat tercapai apabila TNI mampu: ahli dan mahir dalam melaksanakan tugas pertahanan negara; bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis; memiliki disiplin, menaati hukum, dan memiliki *l'espirit de corps* (jiwa korsa) yang tinggi dan sehat; memiliki moral dan etika keprajuritan yang tinggi; menghargai dan membela rakyat secara proporsional; menghargai pihak berkuasa atau supremasi sipil.

Pola di atas merupakan cerminan dari konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Johan Galtung yaitu: “Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.” Hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat sipil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa campur tangan militer, dan terpenuhinya kebutuhan TNI melalui pelatihan dan penyediaan sarana yang memadai tanpa adanya campurtangan sipil.

Akan tetapi, jika merujuk kepada pandangan seluruh informan yang menganggap bahwa masih ada keterlibatan sebagian oknum TNI dalam bidang politik praktis, dan juga adanya upaya untuk kembali memberikan hak bagi TNI untuk dapat memilih dalam pemilihan umum. Maka, dapat dikatakan jalannya proses untuk mewujudkan profesionalisme TNI masih mengalami hambatan sebab seperti yang disyaratkan oleh Fattah bahwa untuk mewujudkan profesionalisme TNI maka tentara harus bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Jika demikian, hal tersebut dapat juga berdampak negatif pada proses dan upaya untuk membangun dan menciptakan iklim yang demokratis di Indonesia.

SIMPULAN

Profesionalisme TNI merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari, mengingat selama 32 tahun kekuasaan orde baru TNI telah banyak berada di luar jalur mereka selaku institusi dan aparat pertahanan negara. Upaya dalam menciptakan TNI yang profesional masih terus dilakukan, yaitu dengan menempatkan kembali TNI ke barak dan mencegahnya kembali masuk dunia politik praktis, namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa upaya membangun demokrasi di Indonesia masih menemui hambatan. Hal ini dikarenakan masih adanya upaya untuk membawa kembali TNI ke dalam dunia politik praktis. Terhambatnya pembangunan demokrasi yang dikarenakan tidak profesionalnya militer dapat memberikan ancaman terhadap hak-hak masyarakat sipil, sebab ketika pemerintahan dikendalikan oleh kekuatan militer, hak-hak masyarakat sipil terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI yang Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Beetham, D, dan Boyle, K. (2000). *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmawan, H. (2005). *Pengaruh reformasi internal TNI terhadap profesionalisme aparat teritorial dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah : Studi kasus di Kodim 0501 Jakarta Pusat*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Fattah, A. (2005). *Demiliterisasi Tentara*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Khasman, E. (2010). *Persepsi prajurit siswa TNI AL tentang profesionalisme TNI dan implikasinya terhadap pembentukan ketahanan Ideologi: Studi di Pusdiklapa dan STTAL Kobangdikal Surabaya, Jawa Timur*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mulyadi. (2009). *Depolitisasi Militer Indonesia: Studi Kasus Fungsi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2009*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Peet, R. (1999). *Theories of Development*. New York: Guilford Press.
- Prasetyo, E. (2005). *Demokrasi Tidak Untuk Rakyat*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rauf, M. (1997). *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*. Jakarta: FISIP UI
- Said, S. (2006). *Militer Indonesia dan Politik; Dulu, Kini, dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah (Pent. Tadjuddin Noer E.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamrin. (2006). *Gagasan Demokrasi Amien Rais dalam Teori Politik Islam Indonesia*. Padang: Andalas University Press.

Trijono, L. (2007). *Pembangunan sebagai perdamaian: rekonstruksi Indonesia pasca-konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Koran Tempo, kolom A5, [Kamis, 6 Desember 2007]

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/19/time/162057/idnews/896548/idkanal/10>

<http://www.semanggipeduli.com/Kerusuhan/Mei/1998.html>

<http://www.tribun-timur.com/viewrss.php?id=60658>

http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/berita_256.htm